

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada waktu sekarang pemerintah Indonesia dan semua lapisan warga mengupayakan untuk bisa selalu mengikhtiarkan pembaruan supaya pembaruan yang diperjuangkan tentunya akan melibatkan alterasi dalam gerakan politik nasional ataupun wilayah. Salah satu gambaran pembaruan yang sudah diselenggarakan ialah meyakinkan beberapa strategi dan peraturan yang bersangkutan dengan pengurusan keuangan pemerintah wilayah dengan target untuk merevisi sistem yang telah tersedia dan responsibilitas yang lebih kapital atas asal daya rakyat yang diurus pemerintah wilayah. Melihat realitanya dalam aplikasi APBD masih banyak hambatan yang mesti temui.

Eksistensi wadah organisasi sektor publik tidaklah sulit untuk ditemukan dalam kehidupan setiap harinya, kita dapat menjumpai organisasi sektor publik ini dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi sektor publik mempunyai target dan meletakkan bantuan pada setiap warga. Pembentukan yang diselenggarakan pada masing-masing daerah tidak selaras dengan yang lainnya, mengingat kebutuhan dan potensi daerah yang terdapat berbeda-beda, dan harus menyesuaikan antara kehidupan masing-masingnya. Sehingga sesuatu ini berakibat kepada strategi dan aktivitas yang musti dibentuk pemerintah daerah untuk mencapai setiap tujuannya.

Instrumen daerah membantu kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintah daerah, yang mana dari berbagai instrumen daerah, yang galat satunya merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). BAPPEDA merupakan forum spesifikasi wilayah pada bidang pengulasan dan persiapan pembentukan wilayah yang diketuai seorang ketua badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada

Gubernur/ Bupati/ Walikota dalam pelaksanaan pemerintah wilayah pada bidang pengulasan dan persiapan pembentukan wilayah.

Peraturan perundang-undangan mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara berpendapat Gubernur/ Bupati/ Walikota mengungkapkan taksiran persyaratan wilayah mengenai kewajiban aplikasi APBD pada DPRD berwujud informasi keuangan yang sudah diselidiki BPK, seminim-minimnya 6 bulan sehabis warsa tertib usai.

Penatausahaan keuangan wilayah bagian penerimaan maupun bagian pengeluaran begitu vital untuk kita pahami dan telaah. Apabila adanya kelemahan dalam menatausahakan keuangan akan mengakibatkan struktur pengendalian intern menjadi tidak bermutu sehingga pada akhirnya akan berdampak pada bukti pencatatan akuntansi keuangan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi materi lembaga yang diminta memanasifestasikan pengerjaan keuangan daerah, termasuk melakukan penatausahaan keuangan, agar pekerjaan dapat berjalan sinkron sesuai dengan peraturan yang telah dicantumkan. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kompetensi responsibilitas dan optimilisasi pengerjaan dan pertanggungjawaban keuangan yang sangat berharga pada setiap kelompok.

Karena penatausahaan keuangan daerah adalah segmen terpenting dari proses pengelolaan keuangan daerah, maka penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir yang berjudul Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat.

## 1.2 Perumusan Masalah

Penatausahaan adalah hal yang penting pada suatu SKPD, hal ini karena tuntutan Undang-Undang maupun untuk memberikan informasi yang tepat. Karena penatausahaan itu penting, maka penulis tertarik untuk mengetahui:

1. Bagaimana penerapan sistem penatausahaan keuangan daerah di Bappeda Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apa dokumen yang terkait pada penatausahaan keuangan daerah di Bappeda Provinsi Sumatera Barat ?
3. Bagaimana prosedur dan proses penatausahaan keuangan daerah di Bappeda Provinsi Sumatera Barat ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penyusunan laporan ini, penulis memiliki beberapa maksud, diantaranya yaitu penulis ingin mengetahui penerapan sistem penatusahaan keuangan daerah di Bappeda Provinsi Sumatera Barat, mengidentifikasi dokumen penatausahaan keuangan daerah di Bappeda Provinsi Sumatera Barat, mengetahui prosedur dan proses penatausahaan keuangan daerah di Bappeda Provinsi Sumatera Barat, mengaplikasikan pengetahuan yang telah diterima selama menjalani pendidikan di Universitas Andalas, memberikan gambaran umum lingkungan dunia kerja sehingga dapat pengalaman dan pemahaman tentang situasi dan kondisi kerja yang sesungguhnya, memenuhi tugas akhir sebagai prasyarat untuk menyelesaikan studi akuntansi, Program Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

## 1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis  
Mempertinggi pandangan dan pemahaman dibidang penatausahaan

keuangan daerah, mengatasi pertanyaan-pertanyaan ketidaktahuan penulis mengenai penatausahaan keuangan daerah khususnya mengenai Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat.

## 2. Bagi Akademik

Menambah kepustakaan dan memberikan masukan khususnya mengenai Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat.

## 3. Bagi Instansi atau Perusahaan

Sebagai informasi yang bisa dimanfaatkan sebagai pertimbangan oleh instansi, serta diharapkan dapat menghasilkan kontribusi dalam mewariskan mimik transparan mengenai penatausahaan keuangan daerah.

### 1.5 Metode Penulisan

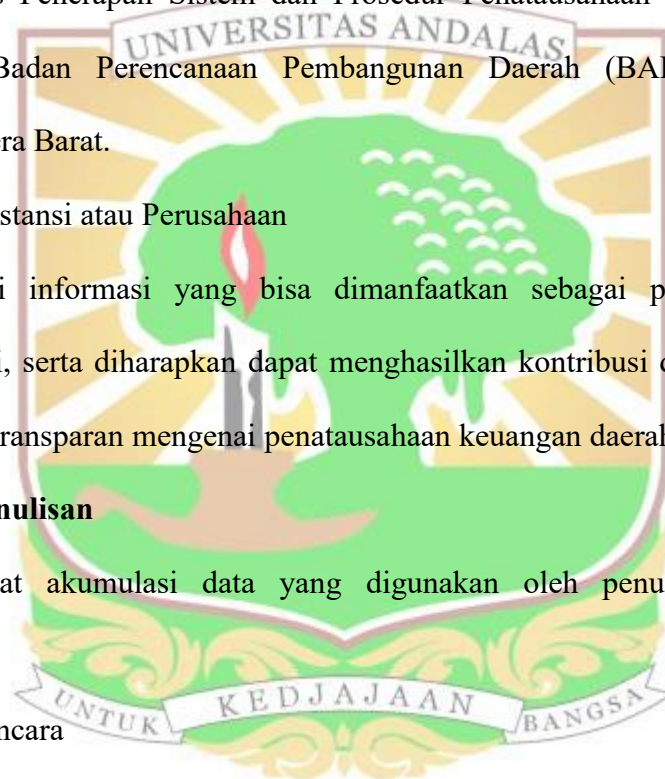
Adapun kiat akumulasi data yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan akumulasi gelagat melalui metode perbincangan dengan golongan-golongan yang berhubungan dengan gelagat yang dibutuhkan.

#### 2. Observasi

Observasi merupakan akumulasi gelagat dengan lantas melangsungkan analisis pada haluan yang diamati dan mengukir sesuatu yang dibutuhkan berhubungan dengan data.



### 3. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu dengan melisankan sastra dan sesuatu yang berhubungan dengan kasus penganalisisan yang dilaksanakan.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini, sistematika penulisan laporan dibagi dalam lima bab. Bab I akan menelaah mengenai pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, dan Sistematika Penulisan Laporan ini. Kemudian pada Bab II membahas tentang landasan teori mengenai Analisis, Sistem, Prosedur, Keuangan Daerah, dan Sistem Penatausahaan Keuangan. Bab III membahas tentang gambaran umum instansi yang terdiri dari Visi dan Misi, Sejarah, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Bab IV membahas tentang hasil kegiatan magang yang berisi tentang pembahasan mengenai Sistem Penerapan dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat. Terakhir pada Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi demi keberlangsungan aktivitas instansi.

